



Daftar Pertanyaan Wawancara

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

- a. Bagaimanakah mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tetap yang dilakukan oleh Dinas PUPR?

Jawab : jadi mekanisme pelaksanaannya itu Dinas PUPR sebagai pengguna barang terlebih dahulu menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR.

Kasi perencanaan dan kepegawaian menyampaikan usulan dari masing-masing bidang untuk diakomodasi dan selanjutnya dilakukan penyusunan RKA menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Perencanaan, kemudian direalisasi sesuai bulan yang tertera dalam rencana anggaran kas.

- b. Apakah dalam penyusunan perencanaan, kebutuhan dan penganggaran aset tetap sudah sesuai dengan standarisasi yang berlaku?

Jawab : Iya sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.

2. Pengadaan

- a. Dari segi pengadaan aset tetap, apakah pelaksanaannya berpedoman pada daftar kebutuhan barang daerah?

Jawab : iya pengadaan di Dinas PUPR dilakukan berpedoman pada daftar kebutuhan barang dengan prinsip efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel.

b. Bagaimana pelaksanaan pengadaan aset tetap pada Dinas PUPR?

Jawab : Pengadaan barang disini dilakukan melalui swakelola dan pemilihan penyedia. Swakelola itu cara memperoleh barang yang disediakan sendiri oleh lembaga. Sedangkan pemilihan penyedia itu cara memperoleh barang yang disediakan oleh pelaku usaha. Selanjutnya pengguna barang setelah melakukan pengadaan barang harus menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Walikota melalui pengelola barang untuk ditetapkan status penggunaannya

3. Penggunaan

Apakah bidang aset menerbitkan SK penetapan untuk mengatur penggunaan aset tetap kepada masing-masing SKPD dan bagaimana status penggunaannya

Jawab : Iya, Dinas PUPR menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat digunakan oleh pihak lain dalam upaya mendukung pelayanan umum sesuai fungsi dan tugas pokok SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan barang milik daerah Dinas PUPR pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan

perolehan lainnya yang sah kepada Walikota. Pengajuan permohonan tersebut dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis dari pengguna barang kepada Walikota paling lambat pada akhir tahun berkenaan. Kemudian Walikota menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun.

4. Pemanfaatan

- a. Bentuk pemanfaatan seperti apa yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?

Jawab : Nah.. jadi pemanfaatan itu kan memanfaatkan barang milik daerah yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Untuk bentuk pemanfaatan yang dilakukan disini itu dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun serah guna atau Bangun guna serah, dan kerjasama penyediaan infrastruktur.

- b. Dilihat dari segi biaya pemeliharaan, apakah pemanfaatan tersebut tidak membebani APBD?

Jawab : Tidak, karena kan dilihat dari segi prioritas kebutuhan jadi tidak membebani APBD

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

- a. Bagaimanakah sistem pengamanan yang dilakukan oleh Dinas PUPR dalam mengelola aset tetapnya dan pengamanan dalam bentuk seperti apa?

Jawab : Jadi pengamanan yang dilakukan disini ada dua jenis yaitu pengamanan fisik dan pengamanan administrasi. Pengamanan fisik dilakukan dengan memasang tanda kepemilikan serta pemagaran. Sedangkan pengamanan administrasi dilakukan dengan mencatat dan menyimpan dokumen bukti kepemilikan aset secara aman dan tertib terhadap barang inventaris dalam proses pemakaian.

- b. Apakah Dinas PUPR mencatat proses pemeliharaan aset tetap ke dalam kartu pemeliharaan dan membuat laporannya dilingkungan SKPD?

Jawab : Iya, mencatat proses pemeliharaan dan membuat laporan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

6. Penilaian

Bagaimanakah mekanisme penilaian aset tetap yang dilakukan oleh bidang aset?

Jawab : Penilaian aset tetap itu dilakukan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik daerah. Penilaian tersebut dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di Dinas PUPR dilakukan prosedur penyusunan neraca penilaian mengenai berapa

jumlah aset serta nilai dari aset tersebut agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan anggaran setiap tahunnya. Penyusunan neraca berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

7. Pemindahtanganan

- a. Apakah proses pemindahtanganan barang milik daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana proses pemindahtanganan di Dinas PUPR ?

Jawab : Pemindahtanganan dilakukan dengan dihibahkan, penjualan dan tukar-menukar. Dalam upaya pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian. Yang dilakukan penilaian hanya penjualan dan tukar-menukar saja, sedangkan untuk hibah tidak perlu dilakukan penilaian. Nah, Penilaian pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar. Pemindahtanganan ini telah dilakukan berpedoman pada Permendagri No. 19 Tahun 2016

8. Pemusnahan

- a. Bagaimanakah cara pemusnahan barang milik daerah? Dalam kondisi apa hal tersebut dilakukan?

Jawab : Nah.. untuk cara pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun dan cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila barang tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat

dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Penghapusan

- a. Dari segi penghapusan barang milik daerah, apakah pengguna barang mengusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan? Jika demikian, biasanya dalam kondisi apa hal ini dilakukan ?

Jawab : iya betul, jadi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah disini pengguna barang mengusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan. Penghapusan tersebut disebabkan karena barang milik daerah sudah tidak dapat dipergunakan atau kondisi yang telah rusak, pemindahtanganan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang, penyerahan barang milik daerah, pemusnahan dan sebab lain yang perlu dilakukan penghapusan

10. Penatausahaan

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang dilakukan di Dinas PUPR?

Jawab : Penatausahaan aset dikakukan dengan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pembukuan itu kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Inventarisasi itu kegiatan melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Sedangkan Pelaporan itu tindakan penyampaian data dan informasi yang dilaksanakan oleh unit pelaksana penatausahaan. Pelaporan dilakukan semesteran dan tahunan yang digunakan untuk menyusun neraca.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

- a. Bagaimanakah bentuk pembinaan yang dilakukan oleh kepala daerah dalam mengelola aset tetapnya? Apakah sesuai dengan uraian tugas dan wewenangnya?

Jawab : Pembinaan barang milik daerah pada Dinas PUPR dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan memberikan pedoman, pelatihan, supervise dan rapat sosialisasi yang menyangkut pengelolaan barang milik daerah termasuk penatausahaan barang milik daerah.

- b. Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Dinas PUPR, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai?

Jawab : Kalau untuk pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR dilakukan oleh pengguna dan kuasa pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban barang milik daerah

12. Pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD

- a. Bagaimana pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD ?

Jawab : ini sepertinya baru ya dalam permendagri karena yang sebelumnya belum ada, Jadi saya belum terlalu mengerti untuk tahapan ini. Disini tidak ada barang daerah yang pengelolaannya menggunakan ini. Ini seperti rumah sakit kan yang asetnya dibawah kewenangan pengelolaan SKPD yang pengelolaannya melalui BLUD, memang asetnya didapat dari APBD tetapi mereka memiliki kewenangan sendiri dalam mengelola asetnya.

13. Barang milik daerah berupa rumah Negara

- a. Apakah di Dinas PUPR terdapat pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara?

Jawab : Untuk tahapan ini pegawai di Dinas PUPR dalam pelaksanaan tugasnya tidak terdapat rumah negara. Karena kan, rumah negara itu dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut dan untuk hak penghuninya juga terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Jadi di Dinas PUPR tidak terdapat rumah negara.

14. Ganti rugi dan sanksi

- a. Bagaimana penerapan ganti rugi atas aset daerah akibat kelalaian dan penyalahgunaan maupun pelanggaran hukum dalam pengelolaan aset Dinas PUPR?

Jawab : ya, jadi disini untuk siklus ganti rugi dan sanksi sudah dilaksanakan terhadap pengguna barang akibat kelalaian, penyalahgunaan maupun pelanggaran hukum yang merugikan daerah. Tahap ini berpedoman pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang mengatakan setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO FAKULTAS EKONOMI

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax (0352) 461796, e-mail : akademika@umpo.ac.id Webpage www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

Nomor : 788/TV.4/PN/2021
Hal : Ijin Penelitian

Ponorogo, 15 Juni 2021

Kepada :

Yth. Kepala Bakesbangpol Kota Madiun
Jl. Mayor Jend. DI Panjaitan No. 17,
Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET SANTOSO, SE, M.Si
NIK : 19701016 199904 12
Jabatan : Wakil Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : IDA NUR KAYATI
NIM : 18430476
Semester : VI (Enam)
Jurusan : D3 Akuntansi
No. HP : 082245729227
Lokasi/Objek : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun
Lama Penelitian : 1 Bulan
Bidang : Akuntansi Pengantar II
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam hal ini mohon diberi kesempatan untuk mengadakan penelitian pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin guna melaksanakan tugas skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.


 Wakil Dekan,
SLAMET SANTOSO, SE, M.Si
 NIK. 19701016 199904 12

SURAT REKOMENDASI BANKESBANG MADIUN



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Gedung Krida Praja Lt III, Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137
 Telepon : (0351) 462153 Faximili (0351) 462153
 Website : <http://www.madiun.kota.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 070/ *734* /401.205/2021

Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 b. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo tanggal 15 Juni 2021 Nomor : 788/IV.4/PN/2021 Perihal Ijin Penelitian.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : IDA NUR KAYATI
 Tempat/tgl. Lahir : MADIUN, 24 MEI 1999
 Alamat : DESA BULU RT. 014 RW. 002 KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN (HP. 0822 4572 9227)

Judul penelitian : Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

Tujuan penelitian : Untuk Mengetahui Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

Tempat penelitian : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun
 Waktu penelitian : 1 (satu) bulan
 Bidang penelitian : Lain-Lain
 Status penelitian : Dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Anggota peneliti : -

Dengan ketentuan : 1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
 2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk 1 (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
 3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidakberlaku.
 4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 23 Juni 2021



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN**

TJATOER WAHJODIANTO, S. Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671010 198903 1 013

Tembusan :
 Yth. 1. Bp. Walikota Madiun
 (sebagai laporan) ;
 2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi
 UnmuH Ponorogo.

LEMBAR BIMBINGAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO FAKULTAS EKONOMI

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website :www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : **IDA NUR KAYATI**
2. NIM : 18430476
3. Jurusan : D3 Akuntansi
4. Bidang : Pengantar Akuntansi II
5. Alamat : Ds. Bulu, RT.14/RW.02, Kec. Pilangkeceng, Kab. Madiun
6. Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun
7. Masa Pembimbingan : Februari 2021 s/d Januari 2022
8. Tanggal Mengajukan Skripsi : 02 Mei 2021
9. Konsultasi : -

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
02 - Juni - 2021	Bimbingan Proposal	<i>[Signature]</i>
07 - Juni - 2021	Revisi proposal Latar belakang dan Metode penelitian	<i>[Signature]</i>
09 - Juni - 2021	Revisi Proposal Latar belakang	an.
14 - Juni - 2021	Acc Proposal	an.
15 - Juni - 2021	Bimbingan BAB 1,2,3	an.
16 - Juni - 2021	Revisi BAB 1,2,3	an.
17 - Juni - 2021	Revisi Kerangka Pemikiran dan Definisi Operasional Variabel	an.
18 - Juni - 2021	Acc BAB 1,2,3	an.
02 - Juli - 2021	Bimbingan BAB 4 dan 5	an.
07 - Juli - 2021	Revisi BAB 4 dan 5	an.
13 - Juli - 2021	Revisi BAB 4 Hasil penelitian	an.
14 - Juli - 2021	Revisi BAB 4 Pembahasan siklus Pengelolaan Aset Tetap	an.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dan pengecekan dokumen sumber dengan staf sekretariat bidang aset



Pengecekan dokumen sumber dengan staf sekretariat bidang aset 2

DOKUMEN SUMBER

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2020		Formule RKA-RINCIAN BELANJA IKPD				
Urutan Perencanaan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 1.03.0.000.00.001.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program : 1.03.01.2.02 PROGRAM PENYANGGUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang/Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum Dana Abchal Umum Lokasi Kegiatan : Kota Medan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Kelompok Saran : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 100.000.000						
Indikator : Indikator & Toek Ukur Kinerja Kegiatan Capaian Kegiatan : Toek Ukur Kinerja Mawalan : Dana yang dibutuhkan Keluaran : Jumlah Sarana yang Terpenuhi Hasil : Rp.0 5 jenis Melompok Saran/ Kegiatan : ASN Dinas PUTRI Kota Medan						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Abchal Umum						
Lokasi : Kota Medan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Presentase Jumlah Saran yang Terpenuhi						
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
		Koefisien				
5	BELANJA DAERAH					Rp. 89.417.995

Dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)

PROVINSI JAWA TIMUR
 KABUPATEN KARUWATI
 BUDAYA KEMERDEKAAN
 BERKUALITAS
 BERKEadilan
 BERKEBERDAYA SAHABAT
 BERKEMAJUAN

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG TANAH ATAMAH

Provinsi :
 Kab/Kota :
 Bidang :
 Unit Organisasi :
 Sub Unit Organisasi :
 NO. MODE LOKASI :

No	Uraian	Tahun Pengadaan	No. Nama Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M ²)	Letak/Alokasi	Sertifikat	Penggunaan	Asal/luas	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0001	6.706,00	2006	A. Lahan Pertanian No.17	Hak Pakai	2203/2005	38	Gedung Barisan	Pondok
2	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0001	18.726,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Gempal Mendan	Kebun
3	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0003	8.660,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Sanyang	Kebun
4	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0003	2.375,40	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Padi Liris	Kebun
5	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0004	11.660,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 1	Kebun
6	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0005	14.080,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 2	Kebun
7	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0006	25.400,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 3	Kebun
8	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0007	6.995,40	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 4	Kebun
9	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0008	19.809,70	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 5	Kebun
10	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0009	7.750,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 6	Kebun
11	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0010	2.016,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 7	Kebun
12	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0011	6.190,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 8	Kebun
13	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0012	3.442,50	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 9	Kebun
14	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0013	1.460,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 10	Kebun
15	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0014	3.640,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 11	Kebun
16	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0015	1.698,50	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 12	Kebun
17	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0016	630,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 13	Kebun
18	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0017	688,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 14	Kebun
19	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0018	8.000,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 15	Kebun
20	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0019	244,60	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 16	Kebun
21	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0020	2.098,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 17	Kebun
22	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0021	1.564,60	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 18	Kebun
23	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0022	3.447,60	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 19	Kebun
24	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0023	812,75	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 20	Kebun
25	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0024	639,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 21	Kebun
26	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0025	14.458,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 22	Kebun
27	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0026	17.478,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 23	Kebun
28	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0027	4.998,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 24	Kebun
29	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0028	14.188,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 25	Kebun
30	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0029	4.147,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 26	Kebun
31	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0030	8.970,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 27	Kebun
32	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0031	13.466,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 28	Kebun
33	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0032	2.215,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 29	Kebun
34	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0033	11.667,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 30	Kebun
35	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0034	14.660,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 31	Kebun
36	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0035	176.627,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 32	Kebun
37	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0036	1.444,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 33	Kebun
38	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0037	1.100,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 34	Kebun
39	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0038	41.967,00	2002	Kel. Hutanrejo	Hak Pakai			Sauran Hutanrejo 35	Kebun
40	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0039								
41	Tanah bangunan	01.01.11.07.03	0040								

Dokumen KIB A (Kartu Inventaris Barang Tanah)

REKAPITULASI HAKU INVENTARIS BARANG DAN PERALATAN DATA BESUK

PUSKOPKAM JAWA TIMUR
NOVA MADINA
Sampung Kabupaten
Jember dan Tero Bang
Desa Pesisiran Jember dan Tero Bang
12.13.2020/01/2020

No.	No.	Uraian Barang	Jumlah Barang / Meter	Uraian	Mark/Type	Unitas	Baru	Merusak	Abusif	Tempo (Bulan)	Keterangan	Perbaikan	Rentang	Waktu
1	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
2	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
3	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
4	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
5	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
6	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
7	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
8	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
9	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
10	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
11	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
12	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
13	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
14	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
15	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
16	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
17	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
18	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
19	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
20	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
21	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
22	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
23	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
24	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
25	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
26	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
27	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
28	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
29	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
30	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
31	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
32	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
33	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
34	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
35	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
36	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
37	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
38	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
39	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
40	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
41	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
42	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
43	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
44	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
45	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
46	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
47	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
48	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
49	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12
50	02.02.01.01.02	Motor Listrik	0001	Baru	Baru	Baru	2014						12	12

Dokumen KIB B (Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin)

REKAMBUKTI KARTU INVENTARIS BARANG MIKRO CEGUHO DAN BANGUNAN

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MADIUN
Bina Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12.13.20.05.01.01.00

Konstruksi	No. Urut	Kendala	Luas	Volume	Monor	No. Jamb	Letak, atau	Luas	Height	Agar	Status	Volume	Kode	Height
1	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0001	Bak	bangunan	4002	Jl. Letjen Supriatno No 17	311220205	11	52	13	18	15	18
2	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0002	Bak	Tidak	4003	Jl. Pahlawan	311220206	11	52	13	18	15	18
3	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0006	Bak	Tidak	4004	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
4	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0007	Bak	Tidak	4005	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
5	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0008	Bak	Tidak	4006	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
6	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0009	Bak	Tidak	4007	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
7	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0010	Bak	Tidak	4008	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
8	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0011	Bak	Tidak	4009	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
9	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0012	Bak	Tidak	4010	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
10	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0013	Bak	Tidak	4011	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
11	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0014	Bak	Tidak	4012	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
12	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0015	Bak	Tidak	4013	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
13	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0016	Bak	Tidak	4014	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
14	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0017	Bak	Tidak	4015	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
15	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0018	Bak	Tidak	4016	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
16	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0019	Bak	Tidak	4017	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
17	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0020	Bak	Tidak	4018	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
18	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0021	Bak	Tidak	4019	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
19	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0022	Bak	Tidak	4020	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
20	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0023	Bak	Tidak	4021	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
21	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0024	Bak	Tidak	4022	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
22	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0025	Bak	Tidak	4023	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
23	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0026	Bak	Tidak	4024	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
24	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0027	Bak	Tidak	4025	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
25	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0028	Bak	Tidak	4026	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
26	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0029	Bak	Tidak	4027	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
27	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0030	Bak	Tidak	4028	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
28	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0031	Bak	Tidak	4029	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
29	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0032	Bak	Tidak	4030	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
30	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0033	Bak	Tidak	4031	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
31	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0034	Bak	Tidak	4032	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
32	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0035	Bak	Tidak	4033	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
33	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0036	Bak	Tidak	4034	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
34	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0037	Bak	Tidak	4035	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
35	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0038	Bak	Tidak	4036	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
36	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0039	Bak	Tidak	4037	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
37	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0040	Bak	Tidak	4038	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
38	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0041	Bak	Tidak	4039	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
39	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0042	Bak	Tidak	4040	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
40	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0043	Bak	Tidak	4041	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
41	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0044	Bak	Tidak	4042	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18
42	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0045	Bak	Tidak	4043	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	18
43	Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan	03.11.01.01.01	0046	Bak	Tidak	4044	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	18

Dokumen KIB C (Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan)

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MAOLAN
Bidang Kemasyarakatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12.10.32.05.01.01.00

KARTU INVENTARIS BARANG (MELI DALAM) BERGAS DAN JARINGAN

No	Daerah	Nomor Kode Tanah	No.	Jenis Barang	Konstruksi	Perajang (Km)	Lebar (M)	Luas (M ²)	Letak/Lokasi	Asal-usul	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
1	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0001	Hortik	1.700	16	27.200	Jl. Liris Sunario	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.190.160.355,00
2	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0002	Hortik	1.200	10	12.000	Jl. A. Yuni	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	755.774.074,00
3	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0003	Hortik	990	14	7.246	Jl. Periwani	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.225.184.000,00
4	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0004	Hortik	2.340	16	37.440	Jl. Yos Sudirno	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.840.995.801,00
5	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0005	Hortik	1.770	10	17.700	Jl. Basuki Rachmad	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.876.476.258,00
6	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0006	Hortik	840	10	6.400	Jl. S. Purnama	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	725.626.579,00
7	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0007	Hortik	960	10	9.600	Jl. Thanes	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	548.152.700,00
8	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0008	Hortik	1.240	10	12.400	Jl. Lelenda, Hengono	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	753.325.250,00
9	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0009	Hortik	1.730	10	17.300	Jl. Lelenda, Perumahan	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.816.228.450,00
10	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0010	Hortik	990	10	10.890	Jl. Transoyo	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.489.230.227,00
11	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0011	Hortik	990	10	10.890	Jl. H. Agus Salim	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.489.230.227,00
12	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0012	Hortik	1.400	10	14.000	Jl. Susanto Haris	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	6.273.984.756,00
13	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0013	Hortik	1.870	10	18.700	Jl. Maydani, Sangkoro	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.941.791.298,00
14	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0014	Hortik	0	4	187				Hbaik	988.716.483,00
15	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0015	Hortik	150	3	450	Jl. Mangrove X (LII)	31/12/1992	Tanah Negara	Pembelian	212.256.000,00
16	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.04	0014	Hortik	3.160	3	8.459	Jl. Mangrove	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	7.200.000,00
17	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.04	0015	Hortik	300	3	900	Jl. Mangrove	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	243.282.560,00
18	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.04	0016	Hortik	5.300	3	84.300	Jl. Mangrove	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	8.600.000,00
19	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.04	0017	Hortik	280	3	870	Jl. Pajang Buidi	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	24.190.440.419,00
20	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.05	0018	Hortik	210	3	630	Jl. Rawas Buidi	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	929.816.584,00
21	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.05	0019	Hortik	600	3	1.800	Jl. Buidi, Yuni	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	141.720.000,00
22	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.05	0020	Hortik	200	4	800	Jl. Hoidan	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	28.800.000,00
23	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.05	0021	Hortik	475	4	1.425	Jl. Rimek, Mulya	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	13.800.000,00
24	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0022	Hortik	290	3	755	Jl. Gana	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	465.510.534,00
25	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0023	Hortik	400	3	1.200	Jl. Permas Hilir	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	134.707.000,00
26	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.05	0024	Hortik	500	6	3.000	Jl. Limbung Sari Raya	31/12/1992	Tanah Negara	Pembelian	18.200.000,00
27	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.05	0025	Hortik	920	6	5.520	Jl. Bat	31/12/1992	Tanah Negara	Pembelian	48.000.000,00
28	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0026	Hortik	750	10	7.500	Jl. Wonsari	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.115.187.000,00
29	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0027	Hortik	500	6	3.000	Jl. Rimek, Kupa	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.790.635.400,00
30	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0028	Hortik	625	6	3.750	Jl. Rimek, Dama	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.563.247.475,00
31	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0029	Hortik	800	6	4.800	Jl. Sri Rejeki	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	620.045.000,00
32	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0030	Hortik	3.150	6	18.900	Jl. Sri Rejeki	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	4.520.454.434,00
33	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0031	Hortik	800	3	2.400	Jl. Sribi Makmur	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	2.929.299.316,00
34	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0032	Hortik	3.150	4	12.600	Jl. Pajang Bangsa	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	201.800.000,00
35	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0033	Hortik	789	4	3.076	Jl. Pajang AWD	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	574.413.969,00

BKPD
KABUPATEN
MADURA
PROVINSI
JAWA TIMUR

DINAS PERBERKAAH UMUM DAN TATA RUMAH KOTA MADURA

DAFTAR BARANG BAKU YANG AKAN DIHAPUS

Lampiran 1

NO	NAMA BARANG	NO. KODE BARANG	NOMOR REGISTRASI	NO. KODE LOKASI	WARRANTY	LOKUCI KEPERLUAN	TAHUN BERUJ PESERILAH	JUMLAH BARANG	HARGA BAWAH PEROLEHAN BARANG (Rp)	HARGA TOTAL PEROLEHAN BARANG (Rp)	HEADKAM BARANG (Rp, Kt, Rp)	KETERANGAN
1	Kursi busur	02.08.02.01.30	1793 dan 1795	12.13.05.05.01.01.01	-	-	2002	3	1.024.000	3.072.000	Rp	
		02.08.02.01.30	1796 dan 1797	12.13.05.05.01.01.01	-	-	2008	2	880.000	1.760.000	Rp	
		02.08.02.01.30	3079	12.13.05.05.01.01.01	-	-	2003	1	3.000.000	3.000.000	Rp	
2	Printer	02.06.01.04.03	3128 dan 3127	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2012	2	668.750	1.337.500	Rp	
		02.06.01.04.03	3202	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2014	4	1.787.500	7.150.000	Rp	
		02.06.01.04.03	3206 dan 3205	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2014	4	3.271.000	13.084.000	Rp	
		02.06.01.04.03	3247 dan 3248	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2013	4	1.108.500	4.434.000	Rp	
		02.06.01.04.03	3250 dan 3253	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2013	6	999.500	5.973.000	Rp	
		02.06.01.04.03	3241 dan 3246	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2009	3	2.038.000	6.114.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2872 dan 2876	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2002	2	2.081.000	4.162.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2877 dan 2873	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	1	399.000	399.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2874	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	1	2.090.000	2.090.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2871	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	1	14.388.000	14.388.000	Rp	
		02.06.01.04.03	1845	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2003	1	2.970.000	2.970.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2000	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	1	877.000	877.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2001	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	1	2.950.000	2.950.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2002	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	1	1.428.000	1.428.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2003	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	1	2.950.000	2.950.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2004	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	1	1.440.000	1.440.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2005	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	4	8.860.000	35.440.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2006	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	1	1.750.000	1.750.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2007	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	1	1.760.000	1.760.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2008	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	1	1.760.000	1.760.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2009	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2009	1	3.040.000	3.040.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2010	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2010	1	8.250.000	8.250.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2011	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2011	6	38.460.000	230.760.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2012	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2012	3	19.844.750	59.534.250	Rp	
		02.06.01.04.03	2013	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2013	3	478.970	1.436.910	Rp	
		02.06.01.04.03	2014	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2014	4	14.478.750	57.915.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2015	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2015	14	33.000	462.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2016	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2016	44	144.500	6.362.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2017	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2017	4	328.000	1.312.000	Rp	
		02.06.01.04.03	2018	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2018	21	352.000	7.392.000	Rp	
		02.06.01.04.03	1798 dan 1792	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2008	9	88.000	230.000	Rp	

Dokumen Daftar Barang yang akan dihapus

Nama Kegiatan	Paket Pekerjaan (Unit Kerja)	Paket Pekerjaan (Unit Kerja)	NAMA UJK	PANGKAT GOLONGAN	NIP	JABATAN
1. Pemasangan dan lingkungan	PENGAWASAN PEMBANGUNAN SALURAN LINDUNG DAN KELUHAN SUDUTAS	Pengawasan pembangunan Saluran Lingkungan Keluhan Sudut	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Punya Tingkat I	19790029 200312 1 003	KEPMU BIDANG CIPTA KAPPA
2. Pemasangan dan lingkungan	PENGAWASAN PEMBANGUNAN SALURAN LINDUNG DAN KELUHAN SUDUTAS	Pengawasan pembangunan Saluran Lingkungan Keluhan Sudut	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Punya Tingkat I	19790029 200312 1 003	KEPMU BIDANG CIPTA KAPPA
3. Pemasangan dan lingkungan	PENGAWASAN PEMBANGUNAN SALURAN LINDUNG DAN KELUHAN RAKORONGAN	Pengawasan pembangunan Saluran Lingkungan Rakorongan	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Punya Tingkat I	19790029 200312 1 003	KEPMU BIDANG CIPTA KAPPA
4. Pemasangan dan lingkungan	PENGAWASAN PEMBANGUNAN SALURAN LINDUNG DAN KELUHAN KUNCIAN	Pengawasan pembangunan Saluran Lingkungan Kunci	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Punya Tingkat I	19790029 200312 1 003	KEPMU BIDANG CIPTA KAPPA
5. Pemasangan dan lingkungan	PENGAWASAN PEMBANGUNAN SALURAN LINDUNG DAN KELUHAN PERUBAAN KUNCIAN	Pengawasan pembangunan Saluran Lingkungan Perbaikan Kunci	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Punya Tingkat I	19790029 200312 1 003	KEPMU BIDANG CIPTA KAPPA
6. Pemasangan dan lingkungan	PENGAWASAN PEMBANGUNAN SALURAN LINDUNG DAN KELUHAN KUNCIAN	Pengawasan pembangunan Saluran Lingkungan Kunci	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Punya Tingkat I	19790029 200312 1 003	KEPMU BIDANG CIPTA KAPPA
7. Pemasangan dan lingkungan	PENGAWASAN PEMBANGUNAN SALURAN LINDUNG DAN KELUHAN KUNCIAN	Pengawasan pembangunan Saluran Lingkungan Kunci	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Punya Tingkat I	19790029 200312 1 003	KEPMU BIDANG CIPTA KAPPA
8. Pemasangan dan lingkungan	PENGAWASAN PEMBANGUNAN SALURAN LINDUNG DAN KELUHAN KUNCIAN	Pengawasan pembangunan Saluran Lingkungan Kunci	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Punya Tingkat I	19790029 200312 1 003	KEPMU BIDANG CIPTA KAPPA
9. Pemasangan dan lingkungan	PENGAWASAN PEMBANGUNAN SALURAN LINDUNG DAN KELUHAN KUNCIAN	Pengawasan pembangunan Saluran Lingkungan Kunci	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Punya Tingkat I	19790029 200312 1 003	KEPMU BIDANG CIPTA KAPPA

Dokumen Daftar Pengawasan Barang